

INSTITUSIONALISASI GERAKAN LINGKUNGAN DALAM MENENTANG RENCANA PLTSa DI KOTA BANDUNG

Wahyu Gunawan, Rd. A. Tachya Muhamad, dan Ari Ganjar Herdiansah
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Kampus FISIP Unpad, Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21, Jatinangor.
gunawanwahyubandung@gmail.com

ABSTRAK. Kepadatan penduduk dan tingginya aktivitas perekonomian menyebabkan permasalahan sampah di Bandung semakin kompleks. Sejak 2004, pemerintah kota merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai solusi. Namun, rencana tersebut mendapatkan perlawanan kelompok aktivis lingkungan yang kemudian bergabung dengan LPTT-BGC dan Walhi Jabar. Paper ini menganalisis dinamika gerakan lingkungan dalam menentang pembangunan PLTSa. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh pada awal 2012 melalui wawancara dengan para aktivis utama, observasi pada kegiatan mereka, dan dokumentasi pengelolaan sampah di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusionalisasi kelompok aktivis setelah bergabung dengan LPTT-BGC dan Walhi Jabar telah mengubah pendekatan gerakan pada *shallow ecology* dan berhaluan realis. Meskipun institusionalisasi gerakan membawa metode yang lebih persuasif, tetapi di sisi lain memungkinkan para aktivis mengembangkan diri dan memperkuat perjuangannya menolak PLTSa secara lebih terorganisasi. Melalui LPTT-BGC, upaya-upaya gerakan kemudian lebih diarahkan pada penyelamatan kondisi lingkungan yang ada melalui program edukasi masyarakat dan melakukan kerjasama selektif dengan pemerintah dan swasta, sedangkan melalui Walhi Jabar para aktivis dapat memanfaatkan potensi sumberdaya seperti jejaring gerakan, media massa, dan partisipan yang massif.

Kata Kunci: institusionalisasi gerakan, gerakan lingkungan, gerakan sosial, masalah sampah.

THE ENVIRONMENTAL MOVEMENT INSTITUTIONALIZATION AGAINST INCINERATOR WASTE PLAN IN BANDUNG CITY

ABSTRACT. The high population density and economic activity led to a complex waste problem in Bandung. Since 2004, the city government planned to build a Waste-to-Energy (W-t-E/PLTSa) as a solution. However, PLTSa plan get resistance from activist group which then joined LPTT-BGC and Walhi Jabar. This paper analyzes the dynamics of environmental movement organizations (EMOs) to resist PLTSa plan. The study was conducted with qualitative approach. The data was collected at the beginning of 2012 through interviews with the main activists as well as observations on their activities. The results showed that the movement institutionalization has encouraged the activists exercising 'shallow ecology' with realist approach. Despite institutionalization has led activists group to performed persuasive method, however it also supports them to developed and strengthened their networks to resist PLTSa plan in a more organized manner. With LPTT-BGC, the activists struggles were focused on saving existing environmental conditions by public education and creating selective cooperations with government and corporate agencies. Meanwhile through Walhi Jabar, the activists were able to use the resource potencies such as movement networks, mass media, and massive participants.

Keywords: Institutionalization movement, EMOs, social movement, waste problem.

PENDAHULUAN

Besarnya jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang layak telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan di perkotaan (Poredos, 2011). Saat ini kawasan Kota Bandung dan sekitarnya menghasilkan volume sampah rata-rata 4,5 juta ton kubik per hari dengan sistem pengelolaan *open dumping*. Sistem tersebut tidak efektif karena sangat bergantung pada ketersediaan lahan yang semakin tidak memadai. Untuk menggantikan sistem *open dumping*, Pemkot Bandung berencana membangun PLTSa yang dimulai sejak disahkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2004 RTRW dalam rangka mempercepat pembangunan Kota Bandung di wilayah timur. Melalui Perda tersebut, Pemkot Bandung akan menyediakan fasilitas olah raga, terminal terpadu, akses tol, pasar hewan, dan PLTSa di atas lahan seluas 526,27 Ha di Gede Bage (mongabay.co.id, diakses 19 November 2012).

Namun, rencana pembangunan PLTSa yang berteknologi *incinerator* tersebut diprotes oleh masyarakat,

terutama yang bermukim di sekitar Gede Bage. Proses pembakaran sampah akan menghasilkan polusi udara yang mengancam kesehatan penduduk. Beberapa warga kemudian bergabung sebagai kelompok aktivis yang menentang rencana PLTSa. Mereka membentuk komunitas lokal yang dihubungkan oleh lokasi baik secara fisik maupun virtual di mana mereka memiliki kebersamaan dalam nilai dan simbol dalam menentang kebijakan pemerintah (Cnaan, Wilofski, & Hunter, 2008: 1).

Dengan aktivitas yang bertujuan menentang rencana pembangunan PLTSa yang mengancam kesehatan warga dan lingkungan, maka komunitas tersebut menggulirkan gerakan sosial. Menurut Locher (2002: 245) gerakan sosial merupakan tindakan sosial yang dilakukan oleh sekumpulan orang secara terorganisir, penuh pertimbangan, dan berlangsung lama. Stark (1992: 612) menambahkan bahwa gerakan sosial bertujuan untuk mengartikulasikan pendapatnya dengan menggulirkan suatu perubahan ataupun sebaliknya, menahan arus perubahan.

Mengikuti Tarrow (1994), gerakan sosial terdiri

dari upaya menangkap dan menciptakan peluang, bertindak atas nama kolektif, proses pembingkaihan tindakan kolektif, dan menggerakkan struktur. Mengikuti pendapat tersebut, maka terbukanya peluang politik merupakan faktor penting bagi para aktivis dalam memanfaatkan potensi dan mobilisasi jejaring sosial untuk mencapai tujuan. Mereka pun mengelola tindakan kolektif secara strategis, yaitu aksi-aksi yang dilakukan bersama, terorganisir, dan bertujuan untuk menentang PLTSa.

Skema ideologi adalah faktor kekuatan lainnya yang memungkinkan para partisipan mengidentifikasi keberadaannya dalam gerakan. Ideologi yang diusung harus sejalan dengan keluhan masyarakat, sekaligus menawarkan solusi kepada mereka yang berpartisipasi dalam gerakan sosial (Libby, 1998: 18-20). Pada aspek inilah ideologi berperan untuk menjadi landasan yang mengarahkan pemikiran dan keinginan para aktivis pada tujuan yang sama (Markoff, 2002: 37).

Salah satu karakteristik gerakan sosial adalah pertentangan antara kepentingan rakyat melawan kepentingan kelompok elit atau negara (Stern *et al.*, 1992:145). Tarrow (1994: 3) mengungkapkan, untuk menghadapi kekuatan elit, gerakan sosial menekankan pada kekuatan solidaritas di kalangan partisipan baik di kalangan internal maupun dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki tujuan sama.

Dalam perjalanannya, kelompok aktivis kemudian bergabung ke dalam LSM lingkungannya yang telah mapan, yaitu Lembaga Penerapan Teknologi Tepat *Bandung Green and Clean* (LPTT-BGC) dan Wahala Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat (Walhi Jabar). *Bandung Green and Clean* sebenarnya merupakan suatu program lingkungan kerjasama LPTT dengan Pemkot Bandung dan Unilever. Para aktivis penentang PLTSa yang bergabung dengan LPTT kemudian terkonsentrasi pada institusi pelaksana program tersebut yang dinamakan LPTT-BGC. Mengingat fokus gerakannya pada isu-isu lingkungan, baik LPTT-BGC maupun Walhi Jabar adalah termasuk *Environmental Movement Organizations* (EMOs).

Bergabungnya kelompok aktivis ke dalam LPTT-BGC dan Walhi Jabar merupakan bentuk institusionalisasi gerakan, yaitu proses suatu gerakan mengalami pengorganisasian dan profesionalisasi dalam mencapai tujuannya (Mayer & Tarrow, 1998: 25). Ketika para aktivis menggunakan fasilitas LPTT-BGC dan Walhi Jabar dalam melakukan pertentangan terhadap PLTSa, maka gerakannya lebih terorganisir dan tersistemasi. Mereka memiliki struktur gerakan sebagai dasar organisasi yang mengumpulkan berbagai sumberdaya dan informasi untuk memobilisasi aksi kolektif. Termasuk di dalamnya sumberdaya uang, kerja, dan kemampuan khusus dari para anggota atau partisipan (Libby, 1998: 18).

Pengelolaan sumberdaya dalam mencapai tujuan ditentukan pendekatan dan metode gerakan. Mulai dari penggunaan cara-cara keras, seperti radikalisme dan konfrontatif, hingga cara-cara halus seperti kemampuan melakukan lobi dan menggalang aktivisme (Zirakzadeth, 2006: 4-5). Berkaitan dengan karakteristik tersebut, terdapat dua

pendekatan yang berbeda dalam gerakan lingkungan, yaitu pendekatan ekologi mendalam (*deep ecology*) dan ekologi dangkal (*shallow ecology*). Pendekatan ekologi mendalam menganggap lingkungan sama pentingnya dengan manusia, kelompok-kelompok yang mengikuti pendekatan ini biasanya bersifat militan. Gerakan ini cenderung anti kompromis dan berupaya menghancurkan pihak-pihak yang dianggap bertentangan dengan tujuannya. Sedangkan pendekatan ekologi dangkal lebih tertarik untuk melestarikan sumber-sumber daya penting untuk kepentingan manusia di negara-negara yang sedang membangun. Selain itu dalam konsep gerakan lingkungan juga dikenal sayap fundamentalis dan sayap realis. Kelompok fundamentalis bercirikan menolak bekerjasama karena menganggap mereka lebih mengerti tentang gerakan sosial dari pada pihak lain. Di sisi lain, kelompok realis bersifat lebih fleksibel dan memilih untuk berjuang melalui kompromi-kompromi politik (Schruers & Papadakis, 2009: xiii).

Paper ini mengkaji institusionalisasi gerakan lingkungan dalam menentang rencana pembangunan PLTSa di Kota Bandung. Adapun pertanyaan kajian ini antara lain bagaimana perubahan metode gerakan kelompok tersebut ketika bergabung dengan LPTT-BGC dan Walhi Jabar? Bagaimana mereka memanfaatkan peluang politik, mengelola sumberdaya, dan memobilisasi dukungan untuk menolak rencana PLTSa di Kota Bandung? Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk menganalisis dinamika gerakan komunitas dalam menentang rencana PLTSa setelah melalui institusionalisasi gerakan. Selain itu, penelitian ini menggambarkan suatu gerakan sosial yang digerakkan oleh komunitas-komunitas lokal memiliki makna sebagai perjuangan kepentingan publik melawan kepentingan ekonomi yang dibawa oleh agen-agen pemerintah dan swasta.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, karena bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan analisis upaya-upaya para aktivis pada LPTT-BGC dan Walhi Jabar dalam menentang pembangunan PLTSa. Kedua LSM tersebut aktif terlibat dalam berbagai diskusi dan kegiatannya sering diliput media massa, dan sejak 2005 memberi perhatian khusus terhadap masalah sampah dan lingkungan di Kota Bandung.

Pengumpulan data dilakukan pada awal tahun 2012, yaitu sepanjang bulan Februari dan Maret. Wawancara dilakukan dengan empat orang aktivis utama, dua aktivis dari LPTT-BGC dan dua aktivis dari Walhi Jabar. Keempat aktivis tersebut adalah orang-orang yang memiliki program yang memberi perhatian pada masalah PLTSa dan sampah di Kota Bandung. Karena, tidak semua aktivis yang ada di kedua LSM memiliki fokus pada kedua masalah tersebut. Di antara mereka ada juga yang berfokus pada isu kerusakan hutan, pencemaran sungai, dan pencemaran udara. Analisis difokuskan pada

pengalaman para aktivis sampah kota sejak rencana PLTSA mulai digulirkan Pemkot Bandung.

Tema wawancara antara lain digunakan untuk mendalami upaya penolakan pembangunan PLTSA, persoalan sampah di Kota Bandung, kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah ramah lingkungan, kerjasama dan kolaborasi gerakan penolakan PLTSA, dan dinamika di dalam proses gerakan menentang PLTSA. Validasi data dilakukan dengan cara triangulasi informasi yang diberikan oleh para aktivis di kalangan mereka maupun terhadap studi dokumentasi yang relevan dengan rencana PLTSA. Dalam penelitian ini, teknik pengamatan juga digunakan untuk memahami konteks sosial dalam interaksi antar aktivis, interaksi dengan pihak pemerintah, dan kegiatan-kegiatan LPTT-BGC dan Walhi Jabar. Penelitian ini juga meminta klarifikasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terkena dampak rencana PLTSA tentang kontribusi gerakan yang dilakukan oleh aktivis LPTT-BGC dan WALHI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Institusionalisasi Gerakan Melawan PLTSA

Pembangunan PLTSA adalah program pembangunan Pemkot Bandung dalam mengatasi masalah sampah kota yang semakin krusial mengingat pengelolaan sampah sistem *open dumping* tidak akan mampu menampung sampah karena keterbatasan lahan. Konsep PLTSA sebenarnya sederhana, yaitu mengubah sampah menjadi energi listrik yang melibatkan proses pembakaran. Namun, konsep ini dianggap membawa dampak buruk pada lingkungan dan kesehatan.

Masalah PLTSA telah menjadi isu internasional. Teknologi *incinerator* yang diterapkan di negara-negara maju selalu menuai protes dari masyarakat setempat. Di Irlandia, contohnya, komunitas-komunitas lingkungan bersatu untuk tetap menolak *incinerator*. Mereka meyakini kandungan Dioxins dari hasil pembakaran akan membahayakan kesehatan masyarakat dan mencemari lingkungan (Davies, 2008: 104).

Di Kota Bandung, permasalahan dimulai ketika sejumlah warga di Gede Bage merasa tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang pembangunan PLTSA, tetapi rencana tersebut dikabarkan telah mendapatkan persetujuan warga. Eskalasi konflik terjadi manakala sejumlah warga menduga ada manipulasi yang dilakukan oknum pemerintah, sehingga seakan-akan warga telah menyetujui rencana PLTSA. Penolakan terhadap rencana PLTSA waktu itu sebenarnya bukan yang pertama. Sebelumnya telah muncul kasus penolakan terhadap pengelolaan sampah mandiri ITB di kawasan Babakan Siliwangi karena pencemaran asap pembakaran. Kasus *incinerator* ITB dijadikan alasan atas penolakan PLTSA oleh sejumlah warga di Gede Bage yang kemudian menjadi aktivis utama penentang rencana pembangunan PLTSA.

Sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah kota, para aktivis lingkungan melakukan aksi-aksi protes, seperti mengadakan orasi di sekitar kawasan Gede Bage, unjuk rasa di ITB, dan pentas musik bertema menentang PLTSA. Mereka kemudian menyuarakan keluhannya pada konferensi lingkungan internasional di Bali tahun 2007. Aksi tersebut diliput media

nasional dan internasional, di mana isu PLTSA Gede Bage disejajarkan dengan isu berskala nasional seperti Lapindo dan kerusakan lingkungan di Manado. Penggunaan media massa mencerminkan bagaimana peluang struktur politik dimanfaatkan oleh para aktivis untuk memberikan tekanan kepada pemerintah. Menurut Gamson (1993: 528), media massa memberikan kekuatan kepada gerakan sosial dengan cara menyediakan sarana mobilisasi, legitimasi pada wacana, dan memperluas skala konflik. Karena itu, langkah para aktivis memanfaatkan media massa merupakan momentum strategis dalam memulai perjuangan mereka menolak PLTSA.

Meskipun para aktivis telah berada pada tahapan yang mendapat perhatian dari pemerintah, akan tetapi mereka kesulitan dalam mengelola gerakannya. Pertama, para aktivis belum berpengalaman melakukan gerakan. Mereka terdiri dari beberapa ibu-ibu dan pemuda yang mengandalkan informasi di internet dan saran para aktivis lain. Kedua, sejak kemunculan di media massa mereka kerap mendapatkan teror yang dilakukan pihak-pihak tak dikenal sehingga memunculkan rasa tidak aman. Pada tahun 2009, para aktivis kemudian bergabung dengan LPTT-BGC. Suatu LSM lingkungan yang beberapa programnya didukung oleh Pemkot Bandung.

Bergabungnya para aktivis pada LPTT-BGC menurunkan tensi konflik. Cara-cara yang digunakan oleh para aktivis tidak lagi konfrontatif. Melalui organisasi LSM yang telah mapan, para aktivis melakukan gerakan secara lebih terorganisir dan terencana. Mereka pun terlibat dalam program-program yang didanai oleh perusahaan swasta seperti sosialisasi pengelolaan sampah ramah lingkungan di berbagai komunitas warga. Di sisi lain, keterlibatan aktivis dalam LPTT-BGC mempermudah kerjasama dengan LSM-LSM lain dengan visi yang sama, seperti kerjasama dengan Balifokus dan Walhi Jabar.

Perubahan yang terjadi pada aktivis PLTSA setelah bergabung dengan LPTT-BGC menandakan institusionalisasi dari gerakan massa menjadi organisasi formal. Institusionalisasi *EMOs* merupakan fenomena yang biasa terjadi dalam suatu proses gerakan. Rootes (2014: 5) mengatakan institusionalisasi *EMOs* terjadi dari gerakan sosial berbasis partisipasi massa menuju kelompok-kelompok kepentingan. Selain itu, perubahan *EMOs* juga dipengaruhi pertimbangan perluasan cara-cara dari konvensional menuju kontemporer atau dari organisasi partisipan menjadi organisasi profesional dalam mencapai tujuan.

Melalui institusionalisasi, para aktivis menjalin interaksi dengan LSM lain sehingga diperoleh pengetahuan baru tentang mengelola sampah ramah lingkungan, salah satunya teknik mengolah sampah plastik atau kertas menjadi kerajinan tangan yang dapat dijual. Aktivis LPTT-BGC kemudian mengembangkan kreativitas produk dari sampah. Sejak saat itu, LPTT-BGC tidak hanya giat menentang PLTSA, tetapi juga menawarkan solusi dengan mengembangkan sistem pengelolaan sampah rumah tangga menjadi kompos, mengolah sampah menjadi produk komersial, dan mensosialisasikan perilaku 3R (*reduce, reuse, recycle*) kepada warga Kota Bandung.

Aktivist LPTT-BGC kemudian mempromosikan penganganan masalah sampah dengan prinsip *zero-waste* yang salah satunya dengan sistem komposter yang melibatkan partisipasi warga. Namun, pengelolaan sampah komposter tidak berlangsung lama ketika mendapatkan perlawanan dari LSM tertentu. Pengelolaan sampah sistem *open dumping* membawa keuntungan finansial bagi beberapa pihak pengelola sampah karena mendapatkan bayaran berdasarkan besaran volume sampah yang dibawa ke TPA. Dengan pengelolaan sampah secara komposter, volume sampah akan berkurang drastis yang artinya akan mengurangi keuntungan bagi pengelola sampah *open dumping*. Di samping itu, pengelolaan sampah sistem komposter berpotensi menggagalkan rencana pembangunan PLTSa, karena bahan baku PLTSa adalah sampah dalam jumlah besar.

Meskipun program pengelolaan sampah komposter mengalami hambatan, tetapi kelompok aktivis masih menjalankan program lainnya, seperti mendorong warga membentuk usaha mengolah sampah plastik menjadi produk kerajinan tangan. Produk-produk tersebut kemudian dijual melalui internet. Selain itu, mereka memberikan jasa pelatihan membuat kerajinan dari sampah kepada pihak luar. Tidak lama kemudian, beberapa aktivis yang telah memiliki keterampilan pengalaman sering diundang sebagai pemateri dalam berbagai acara *workshop*. Kenyataan tersebut menggambarkan bahwa institusionalisasi para aktivis di LPTT-BGC telah memberikan jalan kepada para aktivis sehingga memiliki dimensi profit (Mayer & Tarrow, 1998) dan *marketing-oriented EMOs* yang menurut Johnston (2011: 77) biasanya terjadi jika memiliki isu yang relevan dengan kondisi warga setempat.

Perubahan metode yang dilakukan para aktivis tidak terlepas dari karakter LPTT-BGC yang dibentuk atas prakarsa kerjasama antara LPTT (LSM), Pemkot Bandung (pemerintah), dan Unilever (swasta). Namun dengan masuknya para aktivis, LPTT-BGC tidak hanya menjadi wadah kegiatan pelestarian lingkungan, tetapi menjadi sarana penolakan PLTSa. Demikian pula sebaliknya, para aktivis tidak hanya berfokus menolak PLTSa tetapi terlibat dalam program pelestarian lingkungan.

Meskipun terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan bersama pihak pemerintah kota, ketika aktivis ingin membuat pendekatan kepada BPLH untuk mempertanyakan kebijakan pembangunan PLTSa, mereka tetap mendapatkan kesulitan. Hal ini dapat diartikan bahwa akses politik yang disediakan oleh LPTT dan pemerintah tidak serta merta dapat dimanfaatkan aktivis untuk mencapai tujuan gerakan. Pemerintah cenderung membuka saluran-saluran tertentu yang sejalan dengan terpenuhinya program lingkungan yang dicanangkan pemerintah, sedangkan ruang untuk bernegosiasi tentang PLTSa tidak tersedia. Hubungan aktivis dengan politisasi DPRD Kota Bandung pun tidak membuahkan hasil. Para politisi sangat sulit didekati apabila menyangkut persoalan kebijakan lingkungan, termasuk tentang pembangunan PLTSa. Di kalangan aktivis telah

tumbuh asumsi bahwa pendekatan terhadap politisi adalah upaya sia-sia. Mereka berkeyakinan bahwa para politisi tidak memiliki atensi terhadap persoalan lingkungan, karena lebih mementingkan kebijakan-kebijakan yang membawa keuntungan bagi mereka atau partai politiknya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ketika para aktivis bergabung ke dalam LSM yang mapan memiliki pola gerakan yang baru. Pertama, hubungan tersebut meredam ketegangan-ketegangan yang dapat terjadi antara penentang PLTSa dengan pemerintah kota yang senantiasa mempromosikan PLTSa. Berbagai aksi protes yang dilakukan aktivis LPTT-BGC tidak lagi berlangsung secara terbuka dan vulgar setelah memiliki jalinan komunikasi yang difasilitasi berbagai program kerjasama. Para aktivis bersepakat untuk mengurangi cara-cara kerasseperti turun ke jalan, karena dengan memanfaatkan jalur kelembagaan melalui LPTT-BGC, aksi menolak PLTSa tetap dapat dilakukan.

Kedua, pola kerjasama antara kedua belah pihak, di mana mereka sama-sama terlibat dalam pelaksanaan program-program yang dicanangkan pihak pemerintah kota. Kerjasama ini telah membentuk hubungan-hubungan yang lebih intens antara aktivis dengan pihak pemerintah kota. Hubungan sosial di antara mereka tidak terbatas pada hubungan pekerjaan, tetapi sedikit meluas pada hubungan pribadi. Di antara mereka saling berhubungan melalui Blackberry Messenger (BBM), Facebook, dan lainnya. Melalui media sosial yang sifatnya lebih personal, mereka lebih leluasa untuk saling bertukar informasi.

Namun di sisi lain, akses politik yang disediakan oleh LPTT membatasi ruang gerak para aktivis dalam melakukan gerakan menentang PLTSa secara frontal. Karena itu gerakan yang dilakukan para aktivis di LPTT-BGC lebih bersifat edukasi masyarakat tentang kelestarian lingkungan dan mempromosikan alternatif pengelolaan sampah, bukan pada penguatan kebijakan. Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan agen pemerintah dan agen perusahaan dalam berbagai program LPTT-BGC yang tentu saja membawa sumberdaya materi yang berguna untuk organisasi. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Rootes (2014: 10) bahwa dinamika *EMOs* di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakatnya.

Institusionalisasi para aktivis ke dalam LPTT-BGC telah mempengaruhi perubahan orientasi gerakan dalam menggulirkan perubahan dan juga sekaligus menahan arus perubahan. Mereka mendorong perubahan, terutama dalam memupuk kesadaran tentang pengelolaan lingkungan di masyarakat, seperti bagaimana menyikapi sampah dan kepedulian tentang kebersihan di sekitarnya. Di sisi lain, mereka menahan arus perubahan yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dengan mengadakan diskusi-diskusi umum dan memanfaatkan jalinan kerjasama mereka dengan instansi pemerintah maupun swasta.

Adaptasi dan Strategi Mencapai Tujuan

Walaupun para aktivis merasa terbatas oleh kemampuan organisasi yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah dan swasta, tetapi mereka tetap berupaya fokus pada tujuan menolak PLTSa. Setidaknya, akses politik yang disediakan LPTT telah memberikan informasi yang luas seputar kebijakan PLTSa yang sedang ditempuh oleh pemerintah. Peningkatan akses politik memang memberikan sumber informasi yang besar bagi suatu gerakan sosial (Dryzek *et al.*, 2003: 52). Kedekatan aktivis dengan para pegawai di BPLH Kota Bandung maupun instansi pemerintah kota lainnya memberi banyak informasi, termasuk tentang perkembangan proyek PLTSa. Contohnya, para aktivis mengetahui bahwa proyek PLTSa akan tetap direalisasikan di Stadion Utama Gede Bage. Informasi-informasi yang diperoleh melalui hubungan dengan pihak pemerintah kota, dijadikan sumberdaya informasi oleh para aktivis sebagai bahan pertimbangan menentukan strategi gerakan selanjutnya.

Meskipun kedua pihak disatukan oleh bentuk kerjasama pelaksanaan program lingkungan, tetapi tidak menghilangkan bentuk-bentuk pertentangan di antara mereka. Sebagian aktivis melihat LPTT-BGC lebih mengambil langkah-langkah persuasif terhadap pemerintah kota. Sedangkan di sisi lain para aktivis pun merasa tidak selalu cocok dengan pendekatan halus tersebut. Mereka percaya bahwa tindakan pemerintah kota yang ngotot merealisasikan PLTSa harus diimbangi dengan aksi-aksi perlawanan yang sama kerasnya. Mereka menyadari meskipun LPTT-BGC melakukan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah ramah lingkungan, tetapi tidak ada program resmi organisasi tersebut yang secara khusus menolak PLTSa. Aksi penolakan PLTSa lebih bertumpu pada inisiatif dari para aktivisnya.

Sebagian aktivis kemudian mencoba membentuk organisasi tersendiri di luar LPTT supaya lebih berfokus melakukan gerakan menolak PLTSa. Namun, organisasi yang didirikan ternyata tidak membawa gerakan yang kuat, karena minim dukungan baik materi, jaringan, maupun sumberdaya manusia. Gerakan ini hanya menarik minat sekumpulan orang yang juga kawan-kawan aktivis utama penolak PLTSa. Meskipun tidak begitu besar, mereka yang bergerak di luar LPTT-BGC berupaya konsisten menolak rencana PLTSa.

Kurang berhasilnya kelompok baru di luar LPTT-BGC disebabkan fokus aktivis utama yang terbagi-terbagi, sedangkan kesatuan kelompok merupakan energi yang mutlak diperlukan dalam suatu gerakan. Maddison dan Sclamer (2006: 115) menyatakan bahwa gerakan sosial dibangun atas perasaan kelompok itu sendiri atau yang disebut '*esprit de corps*.' Keberadaan aktivis dalam basis kelompok yang berbeda tidak hanya mengurangi waktu dan tenaga, tetapi juga mempengaruhi perasaan kesatuan kelompok gerakan yang akhirnya menjadikan perjuangan tidak maksimal.

Namun, kemampuan organisasi LPTT telah menyediakan para aktivis penolak rencana PLTSa memiliki akses terhadap organisasi-organisasi dan aktivis-aktivis lingkungan lainnya. Bangunan jejaring tersebut membawadampak positif bagi perjuangan mereka. Seorang aktivis utama, Ibu Rn, kemudian bergabung dengan Walhi Jabar dan masuk dalam jajaran pengurus. Di Walhi Jabar, Ibu Rn mencoba mencari dukungan para aktivis lain untuk mendukung gerakan menolak PLTSa. Upaya tersebut pada awalnya dirasakan kurang berhasil, sebab ruang lingkup isu yang diperjuangkan oleh Walhi Jabar cukup luas, mulai dari advokasi korban kebijakan lingkungan hingga isu kerusakan hutan di Jawa Barat. Tetapi akhirnya, melalui gerakan politik internal, program penolakan PLTSa di Kota Bandung berhasil masuk dalam agenda Walhi Jabar sejak 2010.

Kegiatan aktivis penolak PLTSa di Walhi Jabar merupakan langkah strategis ketika perjuangannya di LPTT-BGC dan kelompok baru kurang kuat dalam mencapai tujuan. Walhi merupakan organisasi lingkungan yang sudah dikenal dengan jaringan aktivis di skala nasional maupun internasional. Perjuangan yang dilakukan Walhi senantiasa mendapatkan perhatian dari media massa. Karena itu, dengan memasukan program menolak PLTSa dalam agenda organisasi Walhi Jabar, para aktivis telah meningkatkan skala perjuangan dan berpotensi memperoleh sumberdaya dukungan, antara lain para partisipan yang massif dan kekuatan media massa.

Faktor sumberdaya materi juga turut menentukan dinamika kekuatan gerakan. Aspek pendanaan gerakan sering kali menjadi dilema. Di satu sisi, kelompok gerakan memerlukan uang atau materi untuk menutupi beban biaya operasional kegiatan mereka. Namun di sisi lain, pada hakikinya kelompok gerakan adalah organisasi nirlaba. Idealnya, para aktivis penolak rencana PLTSa mendapatkan pembiayaan dari setidaknya dua sumber, yaitu iuran anggota dan donasi. Untuk sumber yang pertama sering kali tidak berjalan dengan alasan yang dapat diterima, yaitu kebanyakan para aktivis tidak memiliki pekerjaan atau profesi yang menghasilkan uang. Waktu dan tenaga mereka pun lebih banyak dicurahkan untuk kegiatan-kegiatan di organisasi. Pihak organisasi merasa sudah sangat diuntungkan dengan sumberdaya tenaga dan pikiran para aktivis tersebut, sehingga tidak menuntut iuran dari para aktivis.

Donasi adalah bentuk sumber pendanaan yang paling memungkinkan bagi gerakan lingkungan. Donasi yang dapat oleh para aktivis berasal dari dua sumber, yaitu berupa program-program kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta serta berupa hibah yang diberikan oleh pihak lain. Bentuk kerjasama program adalah bentuk donasi yang paling umum diperoleh oleh para aktivis di LPTT-BGC. Namun, mereka tidak menerima program kerjasama dengan pemerintah ketika bergerak melalui Walhi Jabar, karena Walhi Jabar memiliki platform nasional untuk tidak menjalin kerjasama program dengan pemerintah dan swasta dengan tujuan menjaga netralitas dan ideologi perjuangannya. Pembiayaan

Walhi hanya bersumber dari donasi pihak tertentu, terutama berasal dari LSM luar negeri.

Dengan demikian, aspek pendanaan merupakan sumberdaya yang minim dimiliki oleh gerakan penolakan rencana PLTSa. Mereka tidak dapat mengandalkan iuran anggotakarena kondisi ekonomi personal yang tidak memungkinkan, sedangkan donasi pun terbatas. Selama ini, pembiayaan gerakan sering kali berasal dari donasi para aktivis utama yang secara ekonomi lebih mapan. Kondisitersebut menggambarkan potensi kelemahan lainnya, yaitu sumberdaya partisipan. Para aktivis partisipan yang belum memiliki pekerjaan banyak yang berhenti dari kegiatan di gerakan setelah mereka berkeluarga. Karena itu, para aktivis yang bertahan dalam gerakan menolak PLTSa cenderung silih berganti. Mereka yang tetap bertahan biasanya adalah aktivis-aktivis utama yang dari sisi finansial lebih baik. Namun, dimensi *market-oriented* yang didapat melalui institusionalisasi, menjadikan gerakan dapat bertahan ketika tidak mendapatkan dukungan sumberdaya materi yang cukup.

SIMPULAN

Institusionalisasi gerakan para aktivis penolak rencana PLTSa di Kota Bandung yang bergabung ke LPTT-BGC telah mengubah pendekatan gerakannya yang mengalami pergeseran pada metode *shallow ecology*, yaitu penggunaan cara-cara yang lebih persuasif. Perubahan tersebut memberi dampak atas perjuangan penolakan PLTSa, dari yang awalnya melakukan aksi-aksi protes yang kemudian lebih pada aksi damai, seperti mengadakan forum diskusi dan sosialisasi penanganan sampah ramah lingkungan. Institusionalisasi juga telah menyediakan rasa aman bagi para aktivis yang sebelumnya menghadapi aksi *counter-movement* yang cenderung menggunakan cara kekerasan. Karena itu, institusionalisasi gerakan dalam kasus ini juga dipengaruhi oleh tekanan eksternal.

Meskipun institusionalisasi telah menguatkan kekuatan gerakan, tetapi para aktivis dapat menyusun gerakan secara lebih terorganisasi. Pada tahapan ini, para aktivis dihadapkan pada tantangan lainnya, seperti terlibat dalam politik internal jejaring gerakan dan mengelola berbagai sumberdaya: komunikasi dengan agen pemerintah, kerjasama dengan media, menyediakan sumberdaya materi, memelihara dan memanfaatkan jejaring dengan kelompok-kelompok lain, dan menggalang dukungan partisipan secara luas. Namun, di sisi lain para aktivis semakin dituntut untuk menjadikan gerakannya lebih profesional dan berhaluan realis.

Peningkatan kualitas organisasi dan profesionalisme tidak dapat dihindari oleh para aktivis di saat mereka masih perlu membangun gerakan dengan dukungan berbagai sumberdaya yang diperlukan. Karena itu, institusionalisasi gerakan para aktivis dalam menentang PLTSa dapat mengarah pada pencapaian tujuan secara efektif selama mereka konsisten mempertahankan idealismenya di tengah-tengah upayanya melakukan profesionalisasi gerakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Program BOPTN Universitas Padjadjaran Tahun Anggaran 2012 yang telah mendukung dana penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Cnaan, R., Milofski, C., & Huter, A. 2008. Introduction: Creating A Frame for Understanding Local Organizations. In Cnaan, R. & Milofsky, C. (Eds) ,Handbook of Community Movement and Local Organizations (pp. 1-58) New York: Springer.
- Davies, A. R. 2008. The Geographies of Garbage Governance: Interventions, Interactions, and Outcomes. England: Ashtage Publishing Limited.
- Dryzek, J. S., Downes, D., Hunold, C., Scholsberg, D., & Hemes, H. 2003. Green States and Social Movements: Environmentalism in United States, United Kingdom, Germany, & Norway. New York: Oxford University Press.
- Johnston, H. 2011. States and Social Movements. Cambridge: Polity Press.
- Libby, R. T, 1998. Eco Wars: Political Campaigns and Social Movements. New York: Columbia University Press.
- Locher, D. A. 2002. Collective Behavior. Pearson Education Inc. New Jersey: Upper Saddle River.
- Maddison, S. & Scalmer, S. 2006. Activist Wisdom. Sidney: University of New South Wales Press Ltd.
- Markoff, J. 2002. Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: CCSS-Pustaka Pelajar.
- Mayer, D. S., & Tarrow, S. 1998. The Social Movement Society. Oxford: Rowman & Littlefield Publisher Inc.
- Schruers, M. & Papadakis, E. 1999. The A to Z of The Green Movement. Lanham, Toronto, Plymouth UK: The Scarecrow Press, Inc.
- Stark, R. 1992. Sociology. Belmont-California: Wadsworth Publishing Company.
- Stern, P. C., Young, O. R., Druckman, D. 1992. Global Environmental Change: Understanding the Human Dimensions. Washington DC: National Academy Press.
- Tarrow, S. 1994. Power in Movement: Social Movements, Collective Actions, and Politics. USA: Cambridge University Press.
- Zirakzadeth, C. E. 2006. Social Movements in Politics: Comparative Study (Expanded Edition). England: Palgrave MacMillian.
- Sumber-sumber lain:**
- Walhi. 2012. Walhi Tolak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Bandung. <http://www.mongabay.co.id/2012/08/01/walhi-tolak-pembangunan-pembangkit-listrik-sampah-bandung/>, diakses 19 November 2012.